

LAPORAN KINERJA TAHUN 2022



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja dan berakhirnya Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2022 maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 sesuai dengan fungsi dan tugasnya berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan.

Laporan ini disusun dengan maksud sebagai bentuk pertanggungjawaban hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara TA 2022 sesuai Visi, Misi Instansi serta dalam rangka perwujudan Pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan Instruktur Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Pemerintah serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2022 dan Dokumen Penetapan Kinerja 2022.

Namun demikian kami menyadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu guna memenuhi fungsi LKIP sebagai sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, kami mengharapkan saran dan masukan guna perbaikan kinerja pada masa berikutnya. Akhir kata kami mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa dan semua pihak yang berkompeten yang telah membantu sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara TA 2022 dapat terselesaikan dan semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Gunung Tua,
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kab. Padang Lawas Utara


DARMAN, S.sos, MAP
NIP. 19710908 199402 1 001

DAFTAR ISI :

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Daftar Tabel iii

Daftar Gambar iv

Bab I Pendahuluan..... 1

A. Latar Belakang..... 1

B. Dasar Hukum 2

C. Maksud dan Tujuan 3

D. Kedudukan, Tugas Fungsi 3

E. Struktur Organisasi 4

F. Aspek Strategis 6

G. Sistematika Laporan 7

Bab II Perencanaan Kinerja..... 8

A. Perencanaan Kinerja 8

1. Visi dan Misi..... 8

2. Tujuan dan Sasaran..... 8

3. Kebijakan, Strategi dan Program 9

B. Perjanjian Kinerja 33

Bab III Akuntabilitas Kinerja 40

A. Capaian Kinerja 40

B. Analisa Dan Evaluasi Capaian Kinerja..... 41

C. Realisasi Anggaran 60

Bab IV Penutup 63

DAFTAR TABEL :

Tabel II.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.....	9
Tabel II.2	Strategi dan Kebijakan	10
Tabel II.3	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	12
Tabel II.4	Rencana Kinerja Tahunan	12
Tabel II.5	Renja Kerja Tahun 2022	18
Tabel II.6	Rencana Aksi Kinerja	26
Tabel II.7	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2022	33
Tabel II.6	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022.....	15
Tabel III.1	Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2022	40
Tabel III.2	Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dan tahun lalu.....	40
Tabel III.3	Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan /kegagalan	57
Tabel III.4	Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2022	57
Tabel III.5	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022	58
Tabel III.6	Analisis atas Efisiensi Pengguna Sumber Daya	59
Tabel III.7	Realisasi Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022	60

DAFTAR GAMBAR :

Gambar I.1	Cascading	36
Gambar I.2	Pohon Kinerja	38
Gambar I.3	Crosscutting	39

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai bagian dari manajemen kinerja, kedudukan evaluasi kinerja menjadi suatu *issue* strategis yang harus diperhatikan dan dilaporkan oleh pimpinan instansi sebagai manajer dan pemimpin yang mengarahkan instansinya kepada arah pelaksanaan misi dan pencapaian visi organisasi.

Evaluasi kinerja juga merupakan tahap penting dalam mengevaluasi pelaksanaan renstra yang akan menuntun manajemen dan seluruh komponen organisasi pada capaian kinerja yang diinginkan, dengan didasarkan pada perencanaan kinerja yang baik, maka pelaksanaan kinerja juga dapat diukur tingkat pencapaiannya secara operasional, serta dengan melihat berbagai kemungkinan dan alternatif untuk meningkatkan dan memacu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara lebih cepat dan tepat.

Selaras perkembangan reformasi birokrasi, setiap unit institusi pemerintah/publik harus lebih terbuka dan transparans dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, organisasi publik diharapkan dapat membuat suatu rencana strategis (*Strategic Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*) serta Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (*Performance Accountability Report*) organisasi yang mencerminkan transparansi dan akuntabilitas organisasi.

Rencana Kinerja (*Performance Plan*) merupakan uraian lebih lanjut secara periodik dari rencana strategis. Rencana strategis merupakan rencana umum setiap lima tahunan yang harus diuraikan lebih lanjut ke dalam rencana tahunan agar program dan kegiatan dapat terfokus. Dengan adanya rencana kinerja yang telah tersusun diharapkan kinerja organisasi dapat berjalan dengan baik.

Penyelenggaraan pembangunan suatu pemerintahan yang baik harus dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dan dapat mencapai tujuan serta cita-cita bangsa sebagaimana Pembukaan Undang Undang Dasar 1945. Untuk dapat mewujudkan itu semua diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimitas sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dan Undang-undang No : 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, maka pada awal tahun 2023 ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) untuk tahun 2022. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini

merupakan konsekuensi logis di dalam menjalankan kebijakan APBD yang telah ditetapkan sebelumnya dan telah disepakati melalui nota kesepakatan antara legislatif dan eksekutif, selain itu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dalam kaitannya juga merupakan komitmen kuat dari penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Padang Lawas Utara untuk senantiasa menjalankan aturan-aturan yang ada.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban administrasi dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, permasalahan sosial politik lokal yang ada di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara, dengan demikian materi laporan sedikit banyak menyangkut bidang hukum, ketentraman ketertiban, kesatuan bangsa dan lingkungan serta kegiatan lain yang secara strategis berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara yang meliputi masalah sosial dan politik.

B. Dasar Hukum

Dasar Hukum yang menjadi pedoman penyusunan LKIP:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No.244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No.5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang No.9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang no.23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2015 no.58, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No.5679) ;
2. Peraturan pemerintah no.18 Tahun 2016 tentang perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 no.14)
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
4. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB no.53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. peraturan Menteri Negara PAN dan RB no.88 tahun 2021 pedoman evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
6. Peraturan daerah Kabupaten Padang lawas Utara no. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan perangkat Daerah;
7. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara no. 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara;
8. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara no. 9 Tahun 2022 tentang uraian Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan LKIP Tahun 2022 adalah.

1. Maksud Penyusunan LKIP yaitu untuk memberikan Informasi Kinerja yang terukur Kepada Pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Tujuan Penyusunan LKIP yaitu:
 1. Sarana untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah berdasarkan rencana kerja yang jelas dan sistematis dengan sasaran kinerja yang terukur secara berkelanjutan.
 2. Alat untuk mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dari setiap instansi pemerintah dalam menjalankan misi, tugas/jabatan, sehingga dijadikan factor utama dalam melakukan evaluasi kebijakan, program kerja, struktur organisasi, dan penetapan alokasi anggaran setiap tahun.
 3. Sarana untuk mendorong usaha penyempurnaan struktur organisasi, kebijakan public, ketatalaksanaan, mekanisme pelaporan, metode kerja, dan prosedur pelayanan masyarakat berdasarkan permasalahan nyata yang dihadapi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan secara berkelanjutan.
 4. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara untuk meningkatkan kinerjanya dimasa mendatang.

D. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

1. Kepala Badan :

- a. Kedudukan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.
- b. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara bertugas membantu bupati dalam melaksanakan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara.
- c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi :
 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 2. pelaksanaan kebijakan di bidang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, penyelenggaraan Politik dalam Negeri dan Kehidupan Dekrasi, pemeliharaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, Pembinaan Kerukunan antarsuku dan Intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan

nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

3. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, Pembinaan Kerukunan antarsuku dan Intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, Fasilitas Organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, Pembinaan Kerukunan antarsuku dan Intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, Fasilitas Organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Padang Lawas Utara;
6. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara;
7. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati Padang Lawas Utara.

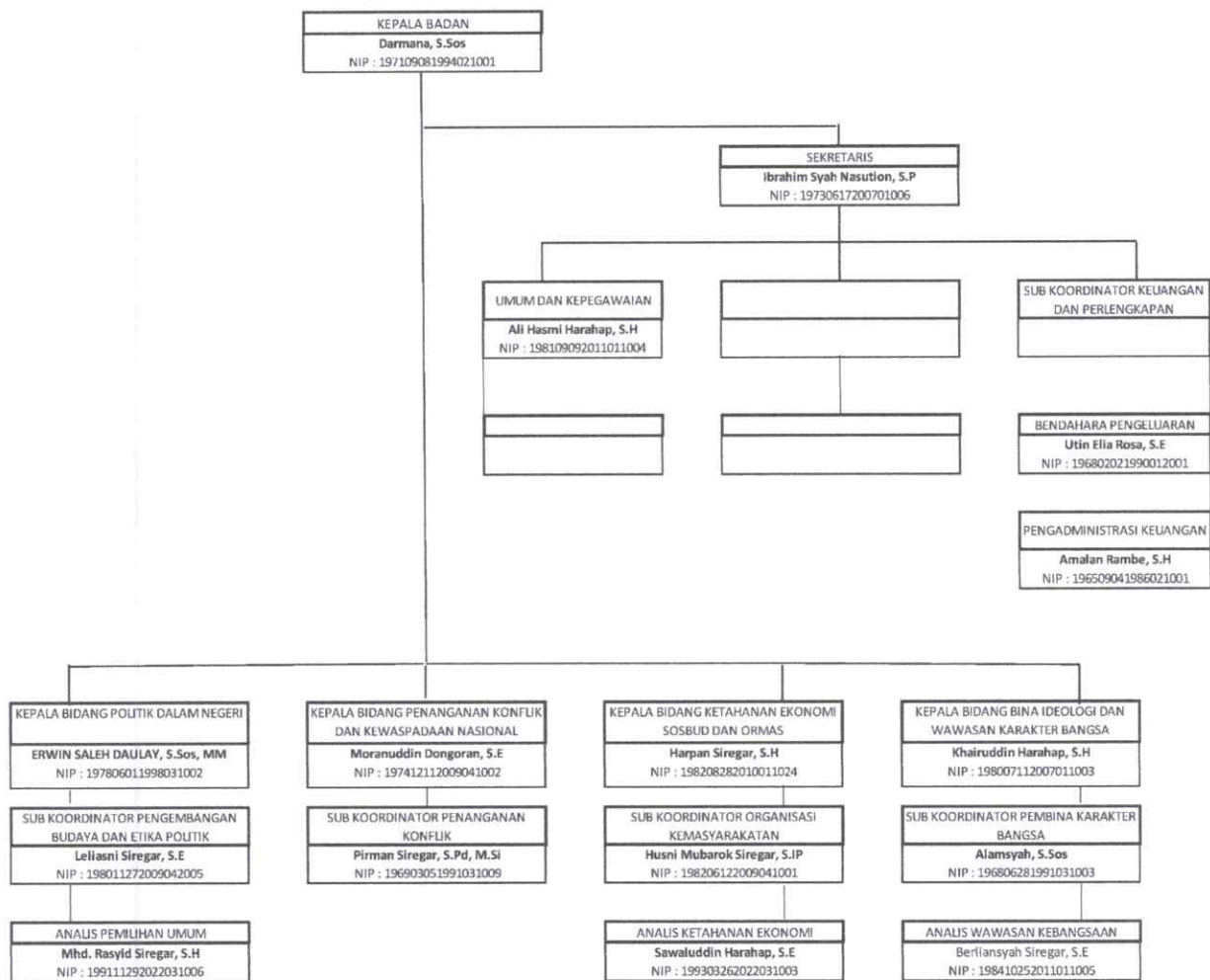
E. Struktur Organisasi

Struktur organisasi OPD digambarkan sebagai berikut : Struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara yang merupakan penjabaran terhadap tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris
- c. Kasubag Umum dan Kepegawaian;
- d. Sub Koordinator Keuangan dan Perlengkapan;
- e. Bendahara Pengeluaran
- f. Pengadministrasi Keuangan
- g. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri;
- h. Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional
- i. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi Sosbud dan Ormas
- j. Kepala Bidang Bina Ideologi Pancasila dan Wawasan Karakter Bangsa
- k. Sub Koordinator Pengembangan Budaya dan Etika Politik
- l. Sub Koordinator Penanganan Konflik

- m. Sub Koordinator Organisasi Kemasyarakatan
- n. Sub Koordinator Pembinaan Karakter Bangsa
- o. Analis Pemilihan Umum
- p. Analis Ketahanan Ekonomi
- q. Analis Wawasan Kebangsaan

Struktur Organisasi Badan Kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Padang Lawas Utara :



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung penyelenggara pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara memiliki SDM/ASN sebanyak 14 orang, terdiri 2 orang perempuan (20 %) dan 12 orang laki – laki (80 %), hal ini menunjukkan bahwa perimbangan gender yang belum baik. Secara definitif jumlah SDM Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebanyak 14 orang Jabatan struktural di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebanyak 6 orang.

Tabel I.1 Jenjang pendidikan dan jabatan struktural per jenis kelamin.

No.	Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan			Jabatan Struktural
		SMA	S1	S2	
1.	Laki – laki	-	11	4	6
2.	Perempuan	-	2	0	0

Sumber : Badan Kesbangpol

Sedangkan berdasarkan pendidikan, SDM Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara di dominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 13 orang sedang untuk jenjang pendidikan S2 sebanyak 3 orang Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I.2 Jumlah ASN berdasarkan jenjang pendidikan.

No.	Pendidikan	Jumlah ASN
1.	Strata 2	3
2.	Starta 1	13
3.	SMA	-

Sumber : Badan Kesbangpol.

F. ASPEK STRATEGIS

Setelah melakukan kajian terhadap kondisi dan berbagai aspek pembangunan dan upaya mewujudkan stabilitas sosial politik, persatuan dan kesatuan bangsa memerlukan energi yang besar dan terencana, serta melibatkan seluruh stake holder, baik pemerintah maupun masyarakat. Dalam perkembangan dewasa ini, harus diakui masih selalu ada pihak – pihak yang menginginkan adanya perpecahan dan konflik atas nama suatu kepentingan tertentu. Mereka tidak ingin melihat negara Indonesia yang aman, tentram dan damai

Penentuan isu startegis menjadi bagian penting bagi keseluruhan, penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019 – 2023 karena dari tahapan ini akan diketahui apakah tatanan utama yang harus diselesaikan oleh Kepala Badan beserta jajarannya selama kedepannya. Berdasarkan hasil analisis terhadap hal-hal yang telah dikemukakan sebelumnya serta dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dalam menentukan isu strategis.

Berkaitan dengan hal tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara menetapkan Aspek strategis sebagai berikut :

1. Persatuan dan kesatuan bangsa adalah salah satu modal dasar dalam suksesnya pembangunan.
2. Stabilitas sosial politik sangat penting bagi terciptanya persatuan dan kesatuan.
3. Pengaruh globalisasi di segala sektor kehidupan termasuk dalam bidang idelologi bangsa

harus diwaspadai dengan meningkatkan wawasan kebangsaan di seluruh elemen masyarakat.

4. Terwujudnya hubungan yang harmonis dengan ormas, LSM dan parpol.
5. Terwujudnya Masyarakat yang kondusif menjadi modal utama terciptanya masyarakat yang Stabil.

G. Sistematika Laporan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2022 Berpedoman pada peraturan Menteri Negara Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja pelaporan keuangan dan tata cara review atas laporan kinerja Instansi Pemerintah Sistem Penyajiannya sebagai berikut:

BAB I . PENDAHULUAN

Meliputi alasan penyusunan LKIP dan wujud kepatuhan atas regulasi serta peran penting akuntabilitas kinerja

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Kedudukan Tugas dan Fungsi
- E. Struktur Organisasi
- F. Aspek Strategis
- G. Sistematika Penyajian LKIP

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

- A. Perencanaan Kinerja
- B. Perjanjian Kinerja

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja
- B. Analisa dan Evaluasi Capaian Kinerja
- C. Realisasi Anggaran

BAB IV. PENUTUP

- A. Simpulan Capaian Kinerja
- B. Langkah Strategis Penguatan Capaian Kinerja Masa Mendatang

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan adalah suatu proses penentuan keputusan atau pilihan alternative penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu pada masa yang akan datang.

1. VISI dan MISI

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mendukung Visi Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019-2023 yaitu :

“Bersama Membangun Padang Lawas Utara yang Beriman, Cerdas, Maju dan Beradat”.

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa kondisi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara ingin mewujudkan masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara yang berkarakter Pancasila guna mendukung pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bupati mendukung Misi Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019-2023 yaitu pada misi ke 1 (satu) :

“Mewujudkan Sistem Pemerintah Yang Demokratis, Aspiratif Dan Akuntabel Demi Tercapainya Masyarakat Yang Sejahtera”.

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan ke depan.

Keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara.

Tabel II.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Tujuan		Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU	Target Kinerja Sasaran pada tahun ke_		
	1	2	3	2021	2022	2023
1.	Terwujudnya generasi muda yang terbebas dari pengaruh negatif yang merusak kualitas hidup masyarakat	Terlaksananya pembinaan Ormas, ketahanan ekonomi sosial budaya dan pencegahan konflik sosial	Persentase Pembinaan Organisasi Masyarakat dan Ketahanan Bangsa	91%	88%	95%
22.	Terwujudnya Tata kelola pemerintahan dalam urusan kesatuan bangsa dan politik yang Efektif, Efesien, dan Akuntabel	Terlaksananya a Pembinaan Politik daerah, Ideologi dan Nilai-nilai Kebangsaan	Persentase Pembinaan politik Daerah	83%	75%	83%
			Persentase Capaian Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	90%	83%	83%

Sumber: Renstra Kesbangpol Padang Lawas Utara

3. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merumuskan strategi dan arah

kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

Tabel II.2
Strategi dan Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Visi: “Bersama Membangun Padang Lawas Utara yang Beriman, Cerdas, Maju dan Beradat”.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi: ”Mewujudkan Sistem Pemerintah Yang Demokratis, Aspiratif Dan Akuntabel Demi Tercapainya Masyarakat Yang Sejahtera”.			
1. Terwujudnya generasi muda yang terbebas dari pengaruh negatif yang merusak kualitas hidup masyarakat	1. Terlaksananya pembinaan Ormas, ketahanan ekonomi sosial budaya dan pencegahan konflik sosial	1. Melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum Terkait Pendidikan Polotik, Ideologi, Nasionalisme, Ketahanan Bangsa Dan Wawasan 1Kebangsaan Yang Mendorong Persatuan Dan Kesatuan Masyarakat Dalam Bingkai NKRI	1.Pemetaan politik, potensi daerah dan potensi kerawanan konflik; 2.Menumbuhkan Semangat Nasionalisme Dan Melestarikan Nilai-Nilai Kebangsaan Dalam Masyakarat Yang Multikultur.;
2. Terwujudnya Tata kelola pemerintahan dalam urusan kesatuan bangsa dan politik yang Efektif, Efesien, dan Akuntabel	2. Terlaksananya Pembinaan Politik daerah, Ideologi dan Nilai-nilai Kebangsaan	2. Menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan masyrakat melalui optimalisasi peran ,KOMINDA, FKDM, PPWK, TIM PORA DAN Timdu PKS 3. Menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan masyrakat melalui optimalisasi peran ,KOMINDA, FKDM, PPWK, TIM PORA DAN Timdu PKS	3.Mengembangkan Dan Mensosialisasikan Arti Penting Nilai-Nilai Pancasila Kepada Aparatur Dan Masyarakat Untuk Memperkuat NKRI; 4.Pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan hingga Kab/kota sesuai (Amanat Permendagri 71/2012); 5.Sinargitas ormas, toleransi beragama dan etnisitas serta penguatan ekonomi, seni dan budaya; 6.Penguatan GNRM (Gerakan Nasional Revolusi Mental) meliputi 5 (lima) gerakan nasional (melayani,

Visi: “Bersama Membangun Padang Lawas Utara yang Beriman, Cerdas, Maju dan Beradat”.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		4. Meningkatkan Penyelenggaraan Pendidikan Politik, di Masyarakat Tentang Etika Dan Budaya Politik, Demokrasi Secara Berkesinambungan Dan Komprehensif	bersih, tertib, mandiri, bersatu); 7.Pembentukan Kader wasbang, politik, pancasila, mediasi konflik dan bela Negara; 8.Pembentukan satuan tugas investigasi dan pemberantasan hasutan dan berita bohong; 9.Sosialisasi UU tentang ormas dan UU tentang pemilu secara terstruktur, intensif dan konprehensif; 10.Pengembangan Demokratisasi melalui pendidikan politik bagi seluruh lapisan masyarakat (pemula, perempuan, marginal, dan disabilitas).

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten
2. Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan
3. Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik
4. Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan
5. Program pembinaan dan pengembangan ketahanan bidang ekonomi sosial dan budaya
6. Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel II.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Terlaksananya pembinaan Ormas, ketahanan ekonomi sosial budaya dan pencegahan konflik sosial	1. Persentase Pembinaan Organisasi Masyarakat dan Ketahanan Bangsa
2	Terlaksananya Pembinaan Politik daerah, Ideologi dan Nilai-nilai Kebangsaan	2. Persentase Pembinaan politik Daerah
		3. Persentase Capaian Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

Sumber : Renstra Badan Kesbangpol tahun 2019 – 2023

Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Padang Lawas Utara dapat dilihat pada Tabel II.4

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
TAHUN 2022**

SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN				KETERANGAN
URAIAN	INDIKATOR	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Terlaksananya pembinaan Ormas, ketahanan ekonomi sosial budaya dan pencegahan konflik sosial	Persentase Pembinaan Organisasi Masyarakat dan Ketahanan Bangsa	88%	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		1 Sub Kegiatan	
				Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang disusun	Dokumen	4 Dokumen	

			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN BIDANG EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ekonomi sosial dan budaya	Terlaksananya Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ekonomi sosial dan budaya		2 Sub Kegiatan	
				Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang disusun	Dokumen	2 Dokumen	
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	110 Orang	

			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		2 Sub Kegiatan	
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,	Orang	420 Orang	
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	350 Orang	

Terlaksananya Pembinaan Politik daerah, Ideologi dan Nilai-nilai Kebangsaan	Persentase Pembinaan politik Daerah	75%	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		1 Kegiatan	
				Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang disusun	Dokumen	4 Dokumen	
	Persentase Capaian Pembinaan Ideologi Pancasila Dan wawasan Kebangsaan	83%	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi, Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		2 Sub Kegiatan	

				Penyusunan Program Kinerja di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Dokumen	1 Dokumen	
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	1350	

Gunungtua, 2022
**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**



**DARMAN, S.Sos, MAP
Pembina TK I**

NIP. 19710908 199402 1 001

Sedangkan dalam Penganggaran dan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II.5 Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2022		Sumber Dana
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
		8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				Rp 6,362,181,700	
		8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentasi capaian penunjang urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota		7 Kegiatan		
		8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan penganggaran, dan evaluasi kinerja	Kab.Paluta			Dana Alokasi Umum
		8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perangkat Daerah	Kab.Paluta			Dana Alokasi Umum
		8.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab.Paluta			Dana Alokasi Umum
		8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab.Paluta	3 Sub Kegiatan	Rp 15,084,000	Dana Alokasi Umum

	8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Kab.Paluta			Dana Alokasi Umum
	8.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab.Paluta	1 Laporan	Rp 15,084,000	Dana Alokasi Umum
	8.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Laporan aset/barang	Kab.Paluta			Dana Alokasi Umum
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab.Paluta	2 Sub kegiatan	Rp 128,031,000	Dana Alokasi Umum
	8.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terpenuhinya pakaian dinas pegawai	Kab.Paluta	3 Paket	Rp 128,031,000	Dana Alokasi Umum
	8.01.01.2.05.11	Bimtek Implementasi Peraturan Per Undang-Undangan	Terlaksananya bimbingan teknis peraturan perundangan	Kab.Paluta			Dana Alokasi Umum
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab.Paluta	6 Sub Kegiatan	Rp 542,145,100	Dana Alokasi Umum
	8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab.Paluta	9 Paket	Rp 135,591,100	Dana Alokasi Umum
	8.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab.Paluta	2 Paket	Rp 8,510,000	Dana Alokasi Umum
	8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab.Paluta	2 Paket	Rp 29,976,000	Dana Alokasi Umum
	8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab.Paluta	1 Paket	Rp 11,034,000	Dana Alokasi Umum

	8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab.Paluta	29 Dokumen	Rp	26,040,000	Dana Alokasi Umum
	8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Paluta	595 Laporan	Rp	330,994,000	Dana Alokasi Umum
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab.Paluta	1 Sub Kegiatan	Rp	11,020,800	Dana Alokasi Umum
	8.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Kab.Paluta	1 Paket	Rp	11,020,800	Dana Alokasi Umum
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Paluta	3 Sub Kegiatan	Rp	637,755,400	Dana Alokasi Umum
	8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Kab.Paluta	12 Laporan	Rp	25,000,000	Dana Alokasi Umum
	8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Kab.Paluta	12 Laporan	Rp	48,960,000	Dana Alokasi Umum
	8.01.01.2.08.04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kab.Paluta	504 Laporan	Rp	563,795,400	Dana Alokasi Umum
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Paluta	3 Sub Kegiatan	Rp	72,260,000	Dana Alokasi Umum
	8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kab.Paluta	4 Unit	Rp	47,270,000	Dana Alokasi Umum
	8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah mesin dan peralatan	Kab.Paluta	22 unit	Rp	24,990,000	Dana Alokasi Umum
	8.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung dan kantor	Kab.Paluta				Dana Alokasi Umum

	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	PERSENTASE CAPAIAN PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Kab.Paluta	1 Kegiatan	Rp 869,815,200	Dana Alokasi Umum
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kab.Paluta	2 Sub kegiatan	Rp 869,815,200	Dana Alokasi Umum
	8.01.02.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah dokumen program kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang disusun	Kab.Paluta	1 Dokumen	Rp 259,498,500	Dana Alokasi Umum
	8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang ideologi Wawasan kebangsaan,Bela Negara,Karakter Bangsa,Pembauran Kebangsaan,Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang ideologi Wawasan kebangsaan,Bela Negara,Karakter Bangsa,Pembauran Kebangsaan,Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	Kab.Paluta	1350	Rp 610,316,700	Dana Alokasi Umum
	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	PERSENTASE CAPAIAN PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Kab.Paluta	1 Kegiatan	Rp 1,579,247,700	Dana Alokasi Umum

	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Kab.Paluta	2 Sub kegiatan	Rp 1,579,247,700	Dana Alokasi Umum
	8.01.03.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang disusun	Kab.Paluta	4 Dokumen	Rp 1,579,247,700	Dana Alokasi Umum
	8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab.Paluta			Dana Alokasi Umum
	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase capaian PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Kab.Paluta	1 Kegiatan	Rp 150,801,200	Dana Alokasi Umum

	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kab.Paluta	3 Sub Kegiatan	Rp 150,801,200	Dana Alokasi Umum
	8.01.04.2.01.01	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang disusun	Kab.Paluta	4 Dokumen	Rp 150,801,200	Dana Alokasi Umum
	8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Evaluasi dan Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Evaluasi dan Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab.Paluta	2 Sub-sub Kegiatan		Dana Alokasi Umum
	8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab.Paluta	1 Sub-sub Kegiatan		Dana Alokasi Umum
	8.01.05	Program Pembinaan dan pengembangan ketahanan bidang ekonomi sosial dan budaya	Persentase capaian Pembinaan dan pengembangan ketahanan bidang ekonomi sosial dan budaya	Kab.Paluta	1 Kegiatan	Rp 243,097,100	Dana Alokasi Umum
	8.01.05.2.01	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ekonomi sosial dan budaya	Terlaksananya Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ekonomi sosial dan budaya	Kab.Paluta	3 Sub Kegiatan	Rp 243,097,100	Dana Alokasi Umum

	8.01.05.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang disusun	Kab.Paluta	2 Dokumen	Rp 190,111,900	Dana Alokasi Umum
	8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab.Paluta	110 Orang	Rp 52,985,200	Dana Alokasi Umum
	8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab.Paluta	5 Sub-sub Kegiatan		Dana Alokasi Umum
	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	PERSENTASE CAPAIAN PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Kab.Paluta	1 Kegiatan	Rp 2,112,924,200	Dana Alokasi Umum
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kab.Paluta	2 Sub Kegiatan	Rp 2,112,924,200	Dana Alokasi Umum

		8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab.Paluta	420 Orang	Rp 125,807,300	Dana Alokasi Umum
		8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab.Paluta	350	Rp 1,987,116,900	Dana Alokasi Umum

Gunung Tua, 2022
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Padang Lawas Utara



DARMAN, Sos
Pembina Tk.I
Nip. 197109081994021001

Gambaran Rencana Aksi Kinerja Tahun 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel II.6 Rencana Aksi Kinerja Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara

**RENCANA AKSI KINERJA SASARAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
TAHUN ANGGARAN 2022**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (RP)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN											
								TW 1			TW 2			TW 3			TW 4		
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9											
Terlaksananya Pembinaan Politik Daerah, Ideologi dan Nilai-Nilai Kebangsaan	Persentase capaian Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	PERSENTASE CAPAIAN PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1 kegiatan	TERLAKSANANYA PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Rp 869,815,200				√			√		√		√	√	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1 sub kegiatan	Terlaksananya Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp869,815,200				√			√		√		√	√	
		Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah dokumen program kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang disusun	1 sub - subkegiatan	Terlaksananya Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Rp259,498,500				√							√		
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang ideologi	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di	5 sub-sub kegiatan	Terlaksananya Koordinasi di Bidang ideologi														

[illegible]

		Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang disusun	3 sub-sub kegiatan	Terlaksananya Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Rp 1,579,247,700				√			√	√				√	
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														
Terlaksananya Pembinaan Ormas, Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Pencegahan Konflik Sosial	Persentase Pembinaan Organisasi Masyarakat dan Ketahanan Bangsa	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	PERSENTASE CAPAIAN PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	1 kegiatan	TERLAKSANANYA PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Rp 150,801,200				√								√	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1 sub kegiatan	Terlaksananya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp 150,801,200				√								√	

		Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang disusun	2 sub-sub kegiatan	Terlaksananya Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Rp 150,801,200			√										√	
		Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Evaluasi dan Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Evaluasi dan Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Terlaksananya Kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Evaluasi dan Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah															
		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibiidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dibiidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibiidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah															
Terlaksananya Pembinaan ormas, Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Pencegahan Konflik Sosial	Persentase Pembinaan Organisasi Masyarakat dan Ketahanan Bangsa	Program Pembinaan dan pengembangan ketahanan bidang ekonomi sosial dan budaya	Persentase capaian Pembinaan dan pengembangan ketahanan bidang ekonomi sosial dan budaya	1 kegiatan	Terlaksananya Pembinaan dan pengembangan ketahanan bidang ekonomi sosial dan budaya	Rp 243,097,100				√	√	√						√		
		Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ekonomi sosial dan budaya	Terlaksananya Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ekonomi sosial dan budaya	2 sub kegiatan	Terlaksananya kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ekonomi sosial dan budaya	Rp 243,097,100				√	√	√								

		Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang disusun	2 sub-sub kegiatan	Terlaksananya Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Rp 190,111,900			√	√	√								
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 sub-sub kegiatan	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Rp 52,985,200				√									
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
Terlaksananya Pembinaan Ormas, Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Pencegahan Konflik Sosial	Persentase Pembinaan Organisasi Masyarakat dan Ketahanan Bangsa	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	PERSENTASE CAPAIAN PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1 kegiatan	TERLAKSANANYA PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Rp 2,112,924,200		√			√							√	

		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	2 sub kegiatan	Terlaksananya Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Rp2,112,924,200		√		√							√	
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2 sub-sub kegiatan	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp125,807,300		√		√							√	
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2 sub-sub kegiatan	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp1,987,116,900		√	√									√

		Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang disusun		Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota															

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Padang Lawas Utara



Darman, S.Sos, MAP
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19710908 199402 1 001

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel II.7 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
1.	Terlaksananya pembinaan Ormas, ketahanan ekonomi sosial budaya dan pencegahan konflik sosial	1. Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan 2. Program pembinaan dan pengembangan ketahanan bidang ekonomi sosial dan budaya 3. Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial
2.	Terlaksananya Pembinaan Politik daerah, Ideologi dan Nilai-nilai Kebangsaan	4. Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik 5. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

B. PERJANJIAN KINERJA

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019 – 2023.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara telah menetapkan.



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DARMAN, S.Sos**

Jabatan : **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **ANDAR AMIN HARAHAHAP, S.STP., M.Si**

Jabatan : **BUPATI PADANG LAWAS UTARA**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut merupakan tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Emangtua, Desember 2022

Pihak Kedua
BUPATI PADANG LAWAS UTARA

Pihak Pertama
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

ANDAR AMIN HARAHAHAP, S.STP., M.Si.

DARMAN, S.Sos
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP. 19710908 199402 1 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya pembinaan Ormas, ketahanan ekonomi sosial budaya dan pencegahan konflik sosial	1. Persentase Pembinaan Organisasi Masyarakat dan Ketahanan Bangsa	88%
2	Terlaksananya Pembinaan Politik daerah, Ideologi dan Nilai-nilai Kebangsaan	2. Persentase Pembinaan politik Daerah 3. Persentase Capaian Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	75% 83%

NO	Kegiatan	Anggaran (Rp)		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp 504.300.700	Rp 869.815.200	APBD
2	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp 1.529.247.700	Rp 1.579.247.700	APBD
3	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp 50.801.200	Rp 150.801.200	APBD
4	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp 2.062.924.200	Rp 2.112.924.200	APBD
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Bidang Ekonomi Sosial dan Budaya	Rp 243.097.100	Rp 243.097.100	APBD
Jumlah		Rp 4.390.370.900	Rp 5.198.982.500	

Gunungtua, Desember 2022

Pihak Kedua,
BUPATI PADANG LAWAS UTARA

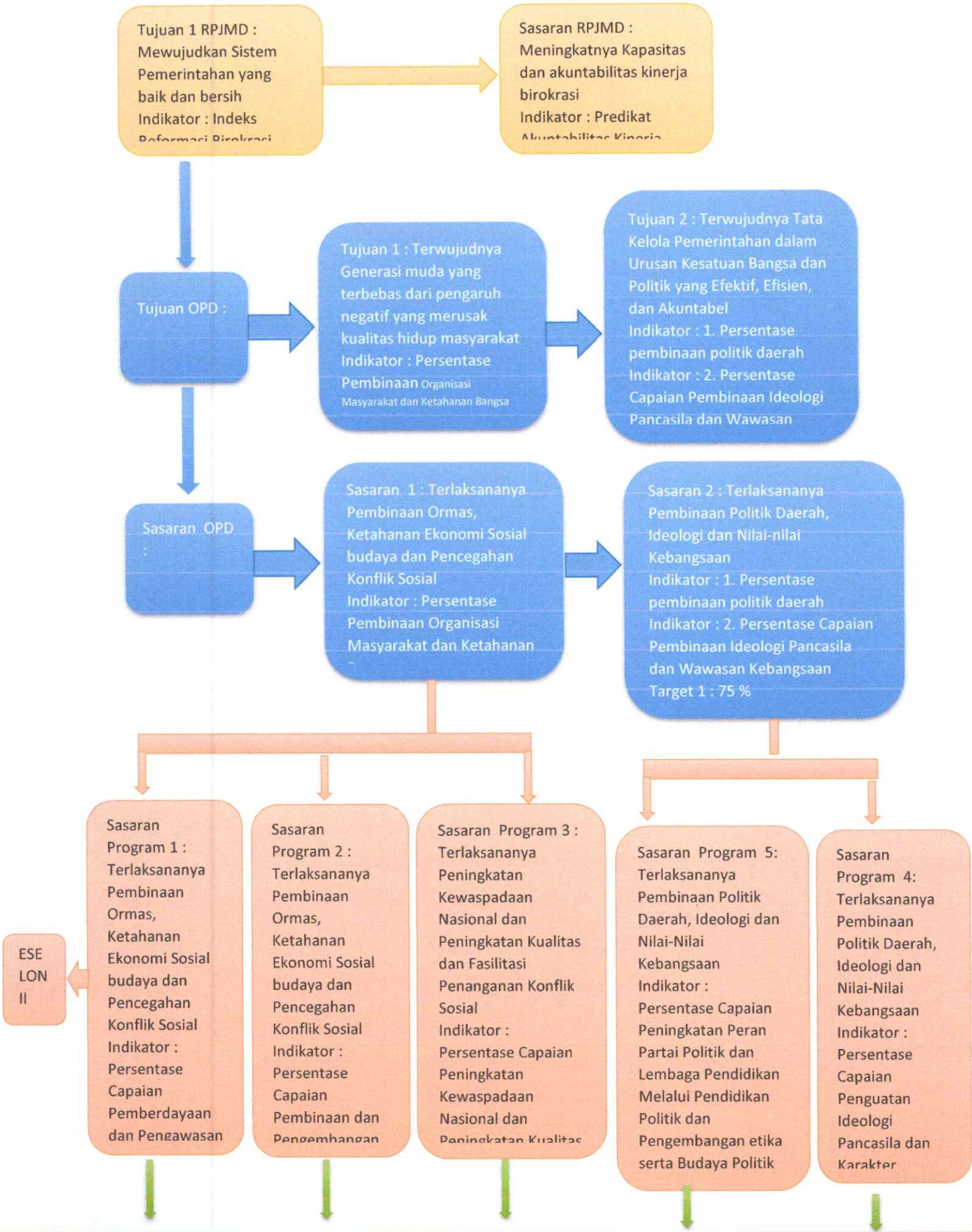
Pihak Pertama,
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

ANDAR AMIN HARAHAP, S.STP., M.Si.

DARMAN, S.Sos
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP. 19710908 199402 1 001

Cascading Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara dapat dilihat pada gambar berikut:

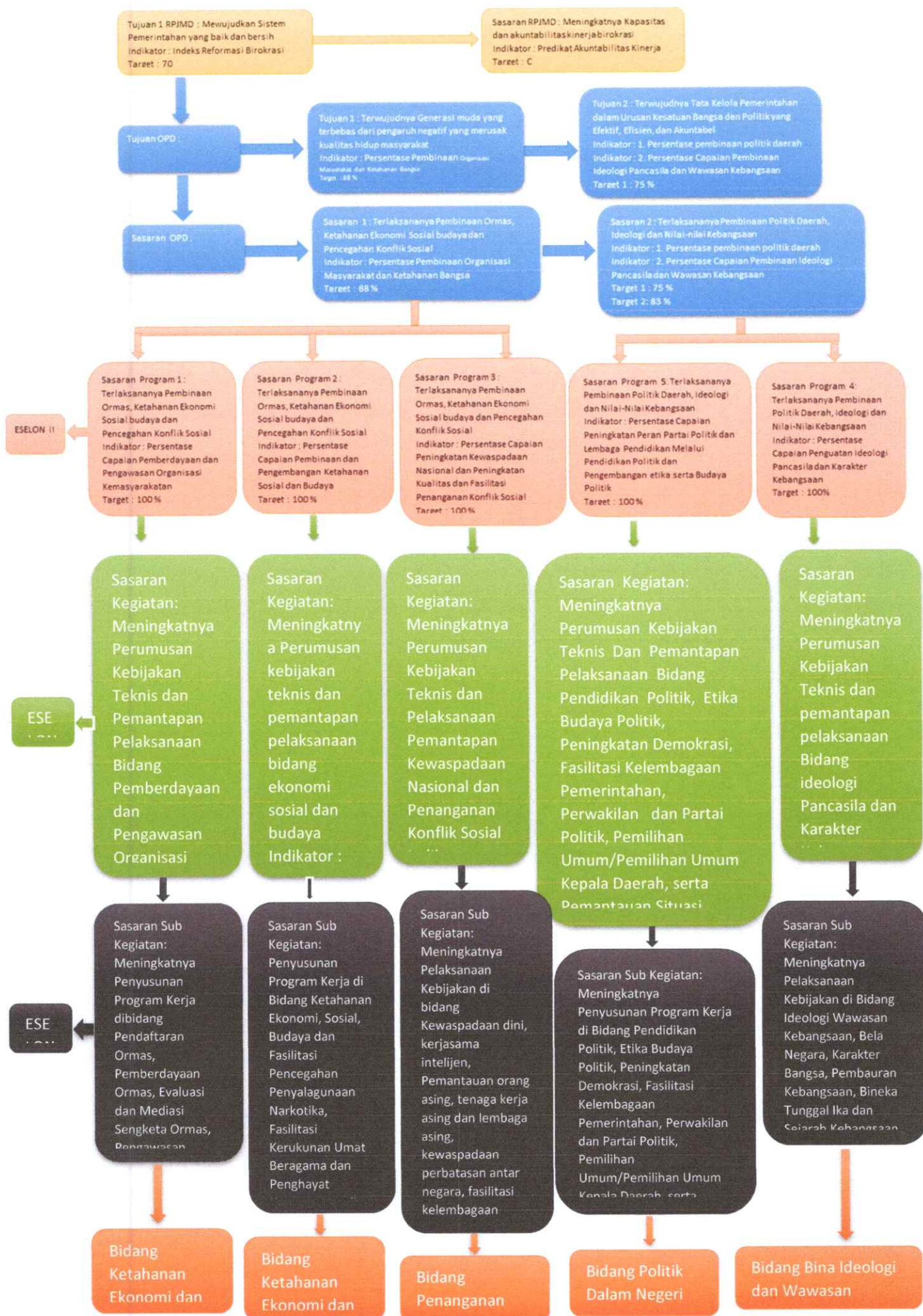
Gambar I.1 Cascading Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara





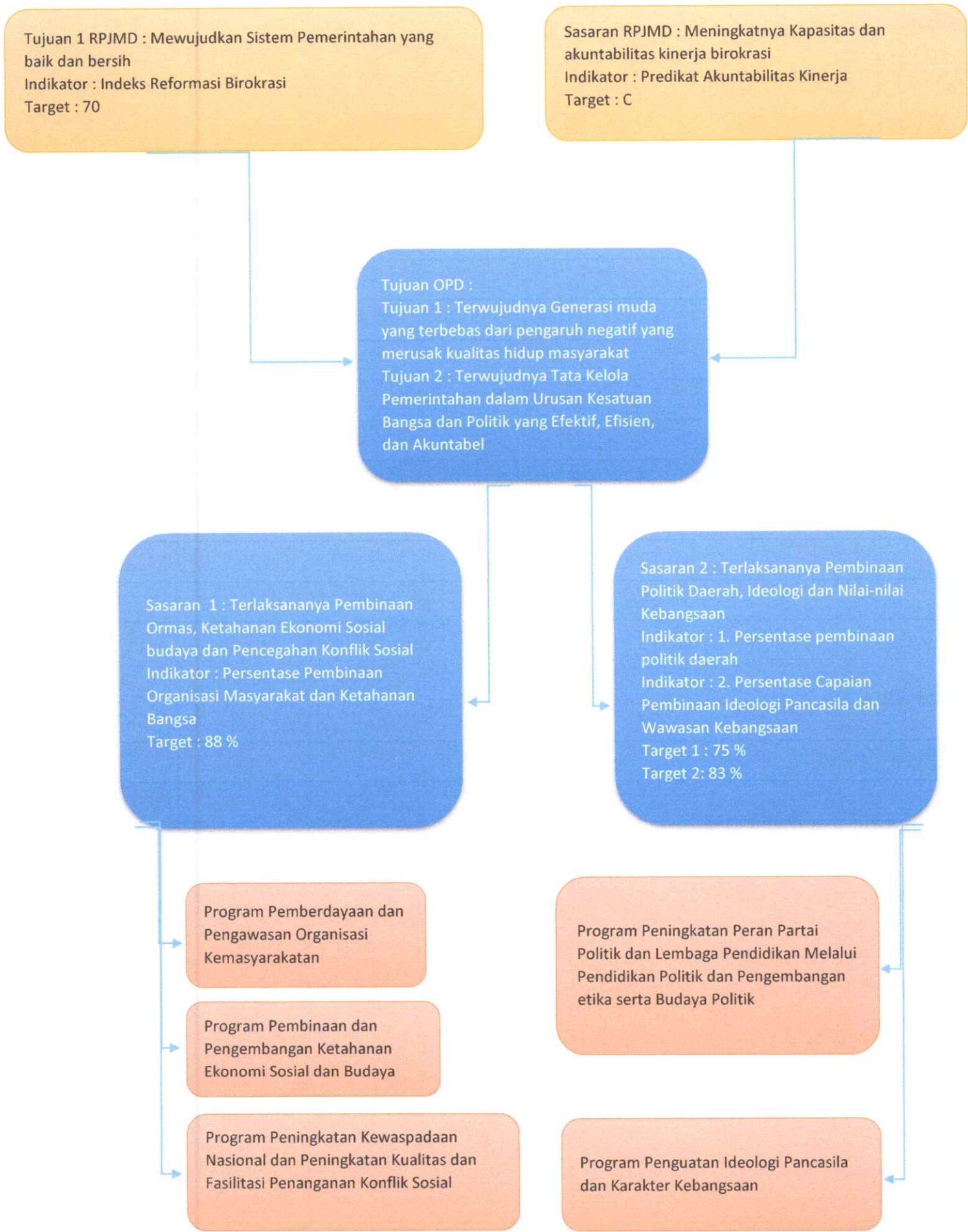
Pohon Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar I.2 Pohon Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



Crosscutting Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar I.3 Crosscutting Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

1. Perbandingan Antara target dan realisasi kinerja Tahun 2022

Untuk pencapaian antara target dan realisasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas utara tahun 2022 bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.1 Perbandingan Antara target dan realisasi kinerja Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
	Terlaksananya pembinaan Ormas, ketahanan ekonomi sosial budaya dan pencegahan konflik sosial	Persentase Pembinaan Organisasi Masyarakat dan Ketahanan Bangsa	88%	100%	114%
	Terlaksananya Pembinaan Politik daerah, Ideologi dan Nilai-nilai Kebangsaan	Persentase Pembinaan politik Daerah	75%	100%	133%
		Persentase Capaian Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	83%	86%	104%

Dalam Mengukur capaian kinerja dan indicator Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2022 dengan ketentuan untuk perhitungan persentase (%) pencapaian target memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi sebagai berikut :

$$\% \text{ Capaian} = \left(\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \times 100 \%$$

2. Membandingkan Antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan beberapa Tahun terakhir

Perbandingan Antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2022 dengan capaian kinerja pada Tahun 2019, 2020, 2021, 2022, dan 2023 pada badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang lawas Utara terdapat dalam tabel III.2 berikut :

PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

Tabel III.2

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET RENSTRA	REALISASI TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2020		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	100	4	5	125%	5	5	100%
2	Jumlah Kegiatan Pembinaan Ormas	100	3	2	66,6%	4	4	100%

Tabel III.2.1 Perubahan Indikator Kinerja Utama

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET RENSTRA	REALISASI TAHUN 2021			REALISASI TAHUN 2022			REALISASI TAHUN 2023		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Persentase Pembinaan Organisasi Masyarakat dan ketahanan Bangsa	100	91%	100%	110%	88%	100%	114%	95%		
2	Persentase pembinaan politik daerah	100	83%	83%	100%	75%	100%	133%	83%		
3	persentase capaian pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan	100	90%	100%	111%	83%	86%	104%	83%		

B. ANALISA DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA

Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan. Sasaran 1: Terlaksananya Pembinaan Ormas, Ketahanan Ekonomi sosial budaya dan pencegahan konflik sosial. Sasaran ini terdiri dari satu indikator kinerja yaitu Persentase pembinaan Organisasi Masyarakat dan Ketahanan Bangsa target yang ditetapkan 88 % terealisasi 100 % capaian 114 %. Adapun program yang mendukung indicator kinerja ini terdiri dari 3 program yaitu:

1. Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan

Capaian Program ini ukur dengan indikator Persentase Ormas di Padang Lawas Utara pada tahun 2022 menargetkan 88%, terealisasi sebesar dengan capaian sebesar 100%. Program ini di dukung dengan 1 (satu) Kegiatan, dan 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Kegiatan ini di dukung dengan 1 (satu) sub kegiatan, yaitu :

1. Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

Sub kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub-sub kegiatan, yaitu :

a. Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan bahaya radikalisme

Pelaksanaan sosialisasi ini adalah peran pemerintah daerah dalam menjaga dan mencegah pelajar dan pemuda secara berkesinambungan tentang bagaimana pencegahan

dan penanggulangan bahaya radikalisme yang dapat memunculkan gerakan-gerakan massa yang dilatarbelakangi pandangan radikal serta aksi terorisme yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat dan juga aksi itu berpotensi mengancam keutuhan Negara Kesatuan republik Indonesia dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000 dan yang terealisasi sebesar Rp. 49.915.200. Kegiatan ini dilaksanakan di SMAN 1 Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara dan kegiatan ini diberikan pemahaman oleh pemateri atau narasumber yang ahli dalam mencegah dan menanggulangi bahaya radikalisme khususnya bagi pelajar dan pemuda masyarakat, acara kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan pelajar dan pemuda.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, ada langkah-langkah yang harus dilakukan :

1. Melakukan koordinasi yang baik dengan pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Melakukan kerjasama ataupun pembagian tugas agar dalam pelaksanaan kegiatan tersebut tidak terjadi tumpang tindih atau miskomunikasi.
3. Menyiapkan sarana dan prasana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, ada hambatan yang harus dihadapi :

1. Personil pegawai yang masih kurang.
2. Jumlah anggaran yang masih kurang

Adapun solusi yang harus dilakukan dalam menghadapi hambatan tersebut adalah :

1. Personil harus ditambahkan, minimal 10 orang.
2. Adanya pertambahan anggaran guna menjangkau beberapa daerah.

b. Sosialisasi tentang tata cara pendaftaran organisasi kemasyarakatan

Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan informasi ataupun pemahaman kepada masyarakat tentang tata cara pendaftaran dan tujuan dari pada pembentukan ormas dengan anggaran sebesar Rp.50.801.200 dan yang terealisasi sebesar Rp. 50.593.200; kegiatan ini dilaksanakan di Desa Gunung Manaon Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara dan dihadiri oleh penarasumber dan peserta yang terdiri dari perwakilan masyarakat dan perwakilan ormas yang ada di Padang Lawas Utara, dengan dilaksanakannya kegiatan ini masyarakat dan ormas diharapkan lebih memahami dan tertib didalam menjalankan roda organisasi masing – masing.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, ada langkah-langkah yang harus dilakukan :

1. Melakukan koordinasi yang baik dengan pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Melakukan kerjasama ataupun pembagian tugas agar dalam pelaksanaan kegiatan tersebut tidak terjadi tumpang tindih atau miskomunikasi.
3. Menyiapkan sarana dan prasana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, ada hambatan yang harus dihadapi :

1. Personil pegawai yang masih kurang.

2. Jumlah anggaran yang masih kurang
3. Alamat disetiap ormas berpindah-pindah, sehingga sulit untuk melakukan komunikasi.
4. Kepengurusan disetiap ormaspun juga sering berganti.

Adapun solusi yang harus dilakukan dalam menghadapi hambatan tersebut adalah :

1. Personil harus ditambahkan, minimal 10 orang.
2. Anggaran ditambahkan agar dalam pelaksanaan kegiatan bisa mengikutsertakan seluruh ormas baik yang sudah terdaftar maupun belum terdaftar.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi disetiap 1 kali dalam sebulan terhadap ormas agar didapatkan data yang valid terkait alamat dan kepengurusannya.



2. Program Pembinaan dan pengembangan ketahanan bidang ekonomi sosial dan budaya

Capaian Program ini ukur dengan indikator Persentase Pembinaan Organisasi Masyarakat dan ketahanan Bangsa di Padang Lawas Utara pada tahun 2022 menargetkan 88% terealisasi sebesar dengan capaian sebesar 100%. Program ini di dukung dengan 1 (satu) Kegiatan, dan 2 (dua) sub kegiatan, yaitu :

a. Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ekonomi sosial dan budaya

Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu :

1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

Sub kegiatan ini terdiri dari 2 (Dua) sub-sub kegiatan, yaitu :

a. Sosialisasi Penyalahgunaan Narkoba

Kegiatan sosialisasi P4GN dan PN di Kabupaten Padang Lawas Utara dasarnya adalah tindak lanjut dari Inpres yang dihadiri oleh perwakilan OKP dan masyarakat seta pemateri dari BNNK Tapsel dan Satnarkoba Polres Tapsel dengan anggaran sebesar Rp. 107.111.400 dan yang terealisasi sebesar Rp. 107.982.400; Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 2 Kali Kegiatan yaitu pertama di Desa Binaan Muara Sigama Kec. Portibi Kab. Padang Lawas Utara dan yang kedua di Desa situmbaga Kec. Halongonan Timur Kab. Padang Lawas Utara dimana para peserta dibekali tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dan penerapan hukuman terhadap para pecandu dan pengedar. Maka dengan dilaksanakannya kegiatan ini diharapkan setiap peserta dapat

menyampaikan informasi tentang dampak buruk daripada penyalahgunaan narkoba kepada masyarakat lainnya serta dapat meminimalisir peredaran gelap narkoba di seluruh wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, ada langkah-langkah yang harus dilakukan :

1. Melakukan koordinasi yang baik dengan pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Melakukan kerjasama ataupun pembagian tugas agar dalam pelaksanaan kegiatan tersebut tidak terjadi tumpang tindih atau miskomunikasi.
3. Menyiapkan sarana dan prasana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, ada hambatan yang harus dihadapi :

1. Lokasi di daerah pelaksanaan kegiatan sangat jauh dan akses jalannya rusak.
2. Anggaran kegiatannya masih kurang.
3. Belum tersedianya sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan penyuluhan narkoba, misalnya posko P4GN, Peralatan dan tenaga medis yang standby untuk kegiatan P4GN.

Adapun solusi yang harus dilakukan dalam menghadapi hambatan tersebut adalah :

1. Tim P4GN baik ditingkat Kabupaten, kecamatan harus diaktifkan
2. Anggaran ditambahkan agar dalam pelaksanaan kegiatan bisa menjangkau di lingkungan sekolah, lingkungan usaha dan sebagainya..
3. Melakukan monitoring dan evaluasi bersama dengan BNN dan Kapoolres disetiap 1 kali dalam tiga bulan terhadap daerah yang rawan penyalahgunaan narkoba.



Sosialisasi penyalahgunaan narkoba Di Desa Binaan Muara Sigama Portibi Tahun 2022



Sosialisasi penyalahgunaan narkoba di Desa Situmbaga Haltim Tahun 2022

b. Sosialisasi tentang bahaya Pergaulan Bebas

Pelaksanaan kegiatan ini adalah peran pemerintah daerah dalam menjaga dan mencegah pelajar dan pemuda secara berkesinambungan tentang bagaimana bahaya

pergaulan bebas, mencegah perilaku menyimpang dari norma – norma yang berlaku dalam masyarakat seperti norma agama dan norma hukum dengan anggaran sebesar Rp.51.750.000 dan yang terealisasi sebesar Rp. 51.651.500 dan dilaksanakan di SMAN 1 HALONGONAN Kab. Padang Lawas Utara, kegiatan ini diberikan pemahaman oleh pemateri atau narasumber yang ahli dalam mencegah bahaya pergaulan bebas khususnya bagi pelajar, acara kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan pelajar.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, ada langkah-langkah yang harus dilakukan :

1. Melakukan koordinasi yang baik dengan pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Melakukan kerjasama ataupun pembagian tugas agar dalam pelaksanaan kegiatan tersebut tidak terjadi tumpang tindih atau miskomunikasi.
3. Menyiapkan sarana dan prasana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, ada hambatan yang harus dihadapi :

1. Personil dalam pelaksanaan kegiatan masih kurang.
2. Anggaran kegiatan ini masih kurang, sehingga kegiatan ini hanya bisa dilaksanakan 1 kali dalam setahun.

Adapun solusi yang harus dilakukan dalam menghadapi hambatan tersebut adalah :

1. Adanya kerjasamanya baik dengan pihak kepolisian, unsur pendidikan disekolah, MUI Kabupaten Padang Lawas Utara dan sebagainya.
2. Anggaran perlu ditambah agar kegiatan ini bisa dilaksanakan minimal 6 kali dalam setahun.



Kegiatan sosialisasi tentang pergaulan bebas bagi pelajar SMU Negeri 1 Halongonan di Hutaimbaru Tanun 2022

2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

Sub kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub-sub kegiatan, yaitu :

- a. Pembinaan Peningkatan Toleransi Kerukunan Umat Beragama

Pembinaan tentang peningkatan toleransi umat beragama ialah bertujuan untuk membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan munculnya ancaman stabilitas nasional dan menjaga keharmonisan dilingkungan masyarakat umat beragama. Kegiatan ini dilaksanakan satu kali dengan anggaran sebesar Rp. 52.985.200 dan yang terealisasi sebesar Rp. 52.777.200

dilaksanakan di Desa Batang Pane II Kec. Halongonan Timur Kab. Padang Lawas Utara dan dihadiri peserta terdiri dari perwakilan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat serta dihadiri oleh pemateri.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, ada langkah-langkah yang harus dilakukan :

1. Melakukan koordinasi yang baik dengan pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Melakukan kerjasama ataupun pembagian tugas agar dalam pelaksanaan kegiatan tersebut tidak terjadi tumpang tindih atau miskomunikasi.
3. Menyiapkan sarana dan prasana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, ada hambatan yang harus dihadapi :

1. Lokasi di daerah pelaksanaan kegiatan sangat jauh dan akses jalannya rusak.
2. Anggaran kegiatannya masih kurang.
3. Belum tersedianya sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan penyuluhan kerukunan umat beragama, misalnya kantor FKUB.

Adapun solusi yang harus dilakukan dalam menghadapi hambatan tersebut adalah :

1. FKUB baik ditingkat kabupaten, kecamatan harus diaktifkan
2. Anggaran ditambahkan agar dalam pelaksanaan kegiatan bisa menjangkau di lingkungan sekolah, lingkungan usaha dan sebagainya..
3. Melakukan monitoring dan evaluasi bersama dengan FKUB, MUI dan unsur terkait lainnya disetiap 1 kali dalam tiga bulan terhadap masyarakat yang memiliki keberagaman agama.

3. Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial

Capaian Program ini ukur dengan indikator Persentase Pembinaan Organisasi Masyarakat dan ketahanan Bangsa di Padang Lawas Utara pada tahun 2022 mentargetkan 88% terealisasi sebesar dengan capaian sebesar 100%. Program ini didukung dengan 1 (satu) kegiatan dan 2 (Dua) sub kegiatan, yaitu :

a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

Kegiatan ini terdiri dari 2 (Dua) sub kegiatan, yaitu :

1. Pelaksanaan Kebijakan dibidang Kewaspadaan Dini, kerjasama intelijen pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik didaerah, dengan Anggaran Rp. 125.807.300 terealisasi sebesar Rp.125.466.400. Kegiatan ini memiliki target realisasi sebanyak 3 kegiatan, dan terealisasi sebanyak 3 kegiatan. Kegiatan ini bertujuan untuk mempertajam program dan kegiatan yang terkait dengan Kesatuan Bangsa dan Politik seperti sosialisasi tentang penanganan konflik social, kewaspadaan

dini daerah Kabupaten Padang Lawas Utara, penanganan gangguan konflik sosial Kabupaten Padang Lawas Utara. Sub kegiatan ini terdiri dari 2 (Dua) sub-sub kegiatan, yaitu :

a. Penanganan gangguan konflik sosial

Penanganan Gangguan Konflik adalah kegiatan pemantauan atas kejadian-kejadian yang terjadi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara selama 12 Bulan seperti adanya kegiatan Demontrasi, Unjuk Rasa dan kejadian2 yang lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan terjadinya konflik sosial ditengah-tengah masyarakat sehingga dapat diambil tindakan yang cepat dan tepat dalam menanganinya sehingga dapat meminimalisir dampak dari terjadi tersebut. Kegiatan ini dilakukan dengan:

1. Melakukan monitoring langsung kelokasi;
2. Melakukan koordinasi dengan kepolisian, Sat Pol PP dan intelijen terkait;
3. Melakukan koordinasi dengan para pihak penghunjuk rasa/terkait konflik.

Hambatan yang dialami dalam kegiatan ini adalah:

1. Kurangnya anggaran pendukung pelaksanaan kegiatan;
2. Kurangnya jumlah sumberdaya manusia yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Poltik Kabupaten Padang Lawas Utara ;
3. Terbatasnya keahlian/kemampuan SDM yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Poltik Kabupaten Padang Lawas Utara.

Langkah antisipasi mengatasi hambatan diatas adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Poltik Kabupaten Padang Lawas Utara sering berdialog dan tukar pikrian dengan aparatur TNI, Kepolisian dan Kejaksaan dalam upaya penanganan gangguan konflik sosial

b. Sosialisasi tentang penanganan konflik sosial

Maksud sosialisasi ini bermaksud memberikan pemahaman kepada masyarakat selaku warga negara atau warga masyarakat tentang penanganan konflik sosial, sedangkan tujuan yang akan diinginkan yaitu masyarakat selaku warga negara dapat mengetahui cara-cara menangani konflik yang terjadi dilingkungan kita sesuai peraturan yang berlaku serta terhindar dari tindakan-tindakan yang tergolong kepada tindakan anarkisme dan main hakim sendiri yang berujung kepada terjadinya pelanggaran hukum yang berlaku. Sedangkan out comes (hasil) yang direncanakan adalah dengan pahamiannya masyarakat dengan penanganan konflik sosial yang terjadi maka tindakan anarkisme dan pelanggaran hukum tidak terjadi pada diri kita, keluarga serta lingkungan. Mengingat konflik sosial yang banyak terjadi ditengah-tengah masyarakat Padang Lawas Utara baik itu konflik Adat, Pertanahan, Sosial Masyarakat yang majemuk dan terkait pengelolaan kekayaan alam antara individu dan perusahaan yang ada.

Hambatan yang dialami dalam kegiatan ini adalah terbatasnya anggaran yang ada sehingga jumlah masyarakat yang tersosialisasi menjadi sangat terbatas.

Langkah mensiasati hambatan ini adalah dengan memaksimalkan kegiatan yang ada.



2. Pelaksanaan koordinasi dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi bidang kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah. Target realisasi sebanyak 100 orang, dan terealisasi 100 orang. Kegiatan ini direalisasikan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara dengan Forum dialog kewaspadaan dini daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Narkotika, dengan Anggaran Rp. 1.987.116.900 terealisasi sebesar Rp.1.936.398.100. Kegiatan ini bertujuan terlaksananya Forum Dialog Peningkatan Keamanan dan Ketentraman Masyarakat. Sub kegiatan ini terdiri dari 2 (Dua) sub-sub kegiatan, yaitu :
 - a. Forum dialog peningkatan keamanan dan ketentraman masyarakat

Forum Dialog Peningkatan Keamanan ini adalah satu kegiatan rapat dialog antara Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dengan semua unsur masyarakat Padang Lawas Utara secara luas. Forum Dialog ini bermaksud membina dan memelihara serta

mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi/bahan keterangan tentang ketentraman serta ketertiban masyarakat dalam rangka untuk menjaga stabilitas Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara dan bertujuan memberikan kita pemahaman yang sama tentang potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ancaman tantangan hambatan gangguan (ATHG) di Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara. Sedangkan out comes (hasil) yang direncanakan dari kegiatan Forum Dialog ini adalah dengan pahamiannya kita (masyarakat) tentang potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ancaman tantangan hambatan gangguan (ATHG) dilingkungan kabupaten padang lawas utara khususnya dan umumnya seluruh wilayah NKRI maka kita dapat mengambil langkah-langkah antisipatif dan prepentif sehingga potensi atau ancaman yang timbul dapat dikendalikan sedini mungkin.

Langkah-langkah yang dilaksanakan dalam kegiatan ini adalah dengan mengundang semua unsur masyarakat Padang Lawas Utara secara luas dalam suatu rapat dialog/diskusi untuk menyampaikan potensi-potensi ancaman tantangan hambatan gangguan (ATHG) di Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara serta menyerap aspirasi peserta terkait situasi-situasi yang sedang terjadi dilingkungan masyarakat. Dalam pelaksanaan kegiatan ini tentunya juga mengalami hambatan-hambatan yaitu:

- Ketidak pedulian masyarakat/acuh terhadap situasi lingkungan masing-masing;
- Adanya anggapan masyarakat bahwa tanggung jawab akan situasi lingkungan adalah urusan pemerintah melalui aparaturnya (Polisi dan TNI);
- Hilangnya rasa kekerabatan dilingkungan masyarakat kita sehingga cenderung mementingkan kepentingan sendiri/keluarganya.

Dalam rangka menangani hambatan ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara melakukan:

1. Secara kontinu melakukan kegiatan ini diberbagai lokasi pelaksanaannya di Kabupaten Padang Lawas Utara;
2. Merangkul Tokoh: Masyarakat, Agama dan Pemuda dalam pelaksanaan kegiatan ini; Mendorong peningkatan peran serta tokoh: Adat, Dalihan Natolu dan Hatobongan agar lebih aktif memberikan contoh/tauladan yang baik melalui jabataannya dilingkungan masing-masing.





b. Tim Kewaspadaan Dini

Tim kewaspadaan dini adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815).

Upaya yang dilakukan oleh tim ini adalah:

1. Merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara;
2. Mencari, mengumpulkan data, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi/bahan keterangan dengan unsur intelijen Negara lainnya mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya Ancaman Tantangan Hambatan Gangguan (ATHG) di Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara;
3. Mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kecamatan dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dalam pelaksanaan kewaspadaan dini terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang mengancam stabilitas nasional ; dan
4. Memberikan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara

Hambatan dalam kegiatan ini adalah terbatasnya anggaran karena dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana tersebut diatas maka anggota Tim Kewaspadaan Dini diberikan honorarium setiap bulannya selama satu tahun dan dapat mengadakan rapat secara periodik dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Dalam mengantisipasi hambatan ini Badan Kesatuan Bangsa dan Poltik Kabupaten Padang Lawas Utara melakukan optimalisasi anggaran yang ada serta peningkatan peran serta anggota tim dalam melaksanakan tugas

Sasaran 2: Terlaksananya pembinaan Politik Daerah, ideology dan nilai-nilai kebangsaan. Sasaran ini terdiri dari dua indicator kinerja yaitu:

1. Persentase Pembinaan Politik Daerah dengan target yang ditetapkan 75 % terealisasi 100% capaian 114%. Adapun capaian program yang mendukung indicator kinerja ini terdiri dari satu program yaitu Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik. Analisis dan Evaluasi capaian kinerja diperoleh dari hasil pengukuran kinerja kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran. Beberapa sasaran dapat dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yang saling terkait untuk mencapai sasaran tersebut. Hasil analisis dan evaluasi capaian kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

Program ini di dukung dengan 1 (satu) Kegiatan, 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.

Kegiatan ini di dukung dengan 1 (satu) sub kegiatan, yaitu :

1. Penyusunan Program di Bidang Pendidikan Politik, Etika dan Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik terdiri dari 4 (Empat) sub-sub kegiatan yaitu Pendidikan Pemilih Pemula, Pendidikan Politik Bagi Masyarakat, Sosialisasi Etika dan Budaya Politik, dan Sosialisasi Pendidikan Politik Bagi Perempuan. Jumlah anggaran sebesar Rp. 364.987.700,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 362.963.700,- atau 99,87 %.

- a. Pendidikan Pemilih Pemula

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi yang sarannya adalah pelajar dan remaja/pemilih pemula di Kabupaten Padang Lawas Utara yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran politik bagi pemilih pemula dan meningkatkan kualitas demokrasi dan mendorong pemilih pemula bisa mempergunakan hak pilihnya dengan baik sehingga menghasilkan wakil rakyat yang terbaik dalam menentukan arah pembangunan bangsa dalam mencapai cita-cita negara yaitu untuk kesejahteraan rakyat. Dengan target peserta sebanyak 100 orang dan terealisasi sebanyak 100 orang peserta. Dengan jumlah anggaran kegiatan sebesar Rp.50.000.000,- dan realisasi anggaran kegiatan sebesar Rp.49.896.000,- atau 99,87 %.



b. Pendidikan Politik Bagi Masyarakat

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi yang sasarannya adalah kelompok masyarakat yang bertujuan mendorong dan memperkuat pengetahuan masyarakat dalam kehidupan politik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kegiatan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat dilaksanakan sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 17 Maret 2022 bertempat di Desa Parlimbatan Kecamatan Padang Bolak dan pada tanggal 23 Maret 2022 bertempat di Desa Simanosor Kecamatan Padang Bolak. Dengan target peserta sebanyak 200 orang dan terealisasi sebanyak 200 orang peserta. Dengan jumlah anggaran kegiatan sebesar Rp. 104.995.900,- dan realisasi anggaran kegiatan sebesar Rp.104.775.900,- atau 99,87 %.



c. Sosialisasi Etika dan Budaya Politik

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi yang sasarannya adalah kelompok masyarakat yang bertujuan mendorong dan memperkuat pemahaman politik Masyarakat untuk meningkatkan kesadaran politik sehingga menumbuhkan kedewasaan dalam politik yang sehat. Sosialisasi Etika dan Budaya Politik dilaksanakan sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 14 Juni 2022 bertempat di Desa Padang Garugur Kecamatan Padang Bolak dan pada tanggal 28 Juni 2022 bertempat di Desa Tangga-tangga Hambeng Kecamatan Padang Bolak Tenggara. Dengan target peserta sebanyak 200 orang dan terealisasi sebanyak 200 orang peserta. Dengan jumlah anggaran kegiatan sebesar Rp. 104.995.900,- dan realisasi anggaran kegiatan sebesar Rp.104.775.900,- atau 99,87 %.



d. Sosialisasi Pendidikan Politik Bagi Perempuan

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi yang sasarannya adalah kelompok masyarakat dari kaum perempuan terdiri dari ibu-ibu PKK, darma wanita dan pelajar perempuan yang bertujuan mendorong dan memperkuat pemahaman undang – undang nomor 2 tahun 2011 pasal 2 (ayat 2) pendirian dan pembentukan partai politik menyertakan 30% keterwakilan perempuan. Sosialisasi Pendidikan Politik Bagi Perempuan dilaksanakan sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 29 Juli 2022 bertempat di Desa Napahalas Kecamatan Portibi dan pada tanggal 12 Agustus 2022 bertempat di Desa Sigama Napahalas Kecamatan Portibi. Dengan target peserta sebanyak 200 orang dan terealisasi sebanyak 200 orang peserta. Dengan jumlah anggaran kegiatan sebesar Rp. 104.995.900,- dan realisasi anggaran kegiatan sebesar Rp.103.555.900,- atau 99,87 %.



2. Persentase Capaian Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dengan target yang ditetapkan 83% terealisasi 86% capaian 104%. Adapun capaian program yang mendukung indikator ini terdiri dari 1 program yaitu :

a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan, yaitu :

1. Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang Ideologi Pancasila dan Karakter bangsa

Kegiatan ini didukung dengan 2 sub kegiatan, yaitu :

a. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan direalisasikan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara dengan Melaksanakan Kegiatan Pembinaan Mental Ideologi Kebangsaan

dan Sosialisasi Pendidikan Wawasan Kebangsaan dengan anggaran Rp.259.498.500 dan yang terealisasi sebesar Rp.258.822.500.

1. Pembinaan Mental Ideologi Kebangsaan



- b. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan direalisasikan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara. Beberapa kegiatan yang ditarget terdiri dari 4 kegiatan dan terealisasi 4 kegiatan. Upacara Hari Kebangkitan Nasional, Upacara Hari Kesaktian Pancasila, Hari Pahlawan, dan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia dengan Anggaran

Rp. 610.316.700 dan yang terealisasi sebesar Rp. 605.804.400. Kegiatan ini bertujuan Penguatan Ideologi Pancasila sekaligus adanya kegiatan secara khusus untuk pelestarian adat dan budaya.

1. Hari Kebangkitan Nasional



2. Hari Kesaktian Pancasila



3. Hari pahlawan



4. Hari ulang tahun republik Indonesia



5. Pembinaan karakter bangsa

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2022 di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara sebesar Rp 3.497.921.500,- yang digunakan untuk membiayai Belanja Langsung. Sedangkan realisasi belanja langsung sebesar Rp. 3.375.691.730,- atau sebesar 97%.

Kegagalan/penurunan kinerja akan terjadi apabila adanya pengurangan anggaran, perubahan peraturan yang tiba-tiba dan terjadinya mutasi jabatan.

Alternatif solusi dapat dilaksanakan dengan adanya konsistensi program/kegiatan dan anggaran serta peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur.

Tabel III.3 Analisis Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Perjanjian Kinerja (PK).

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Program / Kegiatan	Capaian Kinerja %	Serapan Anggaran %
1	Persentase Pembinaan Organisasi Masyarakat dan Ketahanan Bangsa	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	114%	99,81%
		Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ekonomi sosial dan budaya		
		Program Pembinaan Pengembangan Ketahanan Bidang Ekonomi Sosial dan Budaya		99,57%
		Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ekonomi sosial dan budaya		
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial		98%
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		
2	Persentase Pembinaan politik Daerah	Program Peningkatan peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	133%	99,87%
		Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		
3	Persentase Capaian Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	104%	99%
		Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel III.4 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
1	Terlaksananya pembinaan Ormas, ketahanan ekonomi sosial budaya dan pencegahan konflik sosial	856.822.500	97%
2	Terlaksananya Pembinaan Politik daerah, Ideologi dan Nilai-nilai Kebangsaan	1.234.802.900	100%
Jumlah		2.091.625.400	97 %

Anggaran dan realisasi belanja langsung Tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

Tabel III.5 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022

Sumber : Renstra Kesbangpol 2019-2023

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Targ et	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Persentase Pembinaan Organisasi Masyarakat dan Ketahanan Bangsa	88%	100%	114%	856.822.500	804.418.600	97%
2	Persentase Pembinaan politik Daerah	75%	100%	133%	364.987.700	362.963.700	100%
3	Persentase Capaian Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	83%	86%	104%	869.815.200	864.626.900	100%
Jumlah					2.091.625.400	2.032.009.200	97%

Efisiensi belanja langsung tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dengan anggaran Rp. 259.498.500,- realisasi Rp. 258.822.500,- (100%).
2. Pelaksanaan koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dengan anggaran Rp. 610.316.700,- realisasi Rp. 605.804.400,- (99%).
3. Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik dengan anggaran Rp. 364.987.700,- realisasi Rp. 362.963.700,- (100%).
4. Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas. Pemberdayaan Ormas. Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas. Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah dengan anggaran Rp. 100.801.200,- realisasi Rp. 100.508.000,- (100%)
5. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi. Sosial. Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika. Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dengan anggaran Rp. 190.111.900,- realisasi Rp. 189.273.900,- (100%).

- 6. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dengan anggaran Rp. 52.985.200,- realisasi Rp. 52.777.200,- (100%).
- 7. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta penanganan konflik dengan anggaran Rp. 125.807.300,- realisasi Rp. 125.466.400,- (100%)
- 8. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik didaerah dengan anggaran Rp. 387.116.900,- realisasi Rp. 336.396.100,- (97%).

Tabel III.6 Analisis atas efesiensi pengguna sumber daya

NO	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Program	Pelaksana	% Capaian Kinerja IKU	Realisasi	% Serapan Anggaran	% Efesiensi
1	Persentase Pembinaan Organisasi Masyarakat dan Ketahanan Bangsa	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Bidang Ketahanan Ekonomi Sosbud dan Organisasi Masyarakat	114%	100%	99,81%	0,19%
		Program Pembinaan dan Pengembangan dan Ketahanan Bidang Ekonomi sosial dan Budaya	Bidang Ketahanan Ekonomi Sosbud dan Organisasi Masyarakat	114%	100%	99,57%	0,43%
		Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial	Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional	114%	100%	98%	2,00%
2	Persentase Pembinaan Politik Daerah	Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Bidang Politik dalam Negeri	133%	100%	99,87%	0,13%
3	Persentase capaian ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan	Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Karakter Bangsa	104%	100%	99%	1,00%

C. REALISASI ANGGARAN

Efisiensi belanja langsung pada tahun 2022 sebesar 97%, dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan. Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 100%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 97%.

Tabel III.7 Realisasi Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2022

No.	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
1	2	Rp 3	4	5	6
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	Rp 3,024,206,537	Rp 2,944,111,358	97%	Rp 97,819,679
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 1,632,994,237	Rp 1,615,432,828	99%	Rp 17,561,409
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 1,617,910,237	Rp 1,600,428,828	99%	Rp 17,481,409
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 15,084,000	Rp 15,004,000	99%	Rp 80,000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 128,031,000	Rp 127,976,000	99.96%	Rp 55,000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 128,031,000	Rp 127,976,000	99.96%	Rp 55,000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 542,145,100	Rp 524,420,600	97%	Rp 17,724,500
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 135,591,100	Rp 134,534,900	99%	Rp 1,056,200
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 8,510,000	Rp 8,497,800	99.86%	Rp 12,200
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 29,976,000	Rp 28,704,000	96%	Rp 1,272,000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 11,034,000	Rp 11,034,000	100%	Rp -
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 26,040,000	Rp 25,680,000	99%	Rp 360,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 330,994,000	Rp 315,969,900	95%	Rp 15,024,100
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 11,020,800	Rp 11,020,800	100%	Rp -
	Pengadaan Mebel	Rp 11,020,800	Rp 11,020,800	100%	Rp -
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 637,755,400	Rp 594,271,130	93%	Rp 43,484,270
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 25,000,000	Rp 25,000,000	100%	Rp -
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 48,960,000	Rp 37,935,730	77%	Rp 11,024,270

	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 563,795,400	Rp 531,335,400	94%	Rp 32,460,000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 72,260,000	Rp 70,990,000	98%	Rp 1,270,000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 47,270,000	Rp 46,060,000	97%	Rp 1,210,000
	Mepeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 24,990,000	Rp 24,930,000	99.76%	Rp 60,000
2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Rp 869,815,200	Rp 864,626,900	99%	Rp 5,188,300
	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp 869,815,200	Rp 864,626,900	99%	Rp 5,188,300
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Rp 259,498,500	Rp 258,822,500	99.74%	Rp 676,000
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Rp 610,316,700	Rp 605,804,400	99%	Rp 4,512,300
3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Rp 1,579,247,700	Rp 1,577,223,700	99.87%	Rp 2,024,000
	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Rp 1,579,247,700	Rp 1,577,223,700	99.87%	Rp 2,024,000
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Rp 1,579,247,700	Rp 1,577,223,700	99.87%	Rp 2,024,000
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Rp 150,801,200	Rp 150,508,000	99.81%	Rp 293,200
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp 150,801,200	Rp 150,508,000	99.81%	Rp 293,200

	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Rp 150,801,200	Rp 150,508,000	99.81%	Rp 293,200
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN BIDANG EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA	Rp 243,097,100	Rp 242,051,100	99.57%	Rp 1,046,000
	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ekonomi sosial dan budaya	Rp 243,097,100	Rp 242,051,100	99.57%	Rp 1,046,000
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Rp 190,111,900	Rp 189,273,900	99.56%	Rp 838,000
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Rp 52,985,200	Rp 52,777,200	99.61%	Rp 208,000
6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Rp 2,112,924,200	Rp 2,061,862,500	98%	Rp 51,061,700
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Rp 2,112,924,200	Rp 2,061,862,500	98%	Rp 51,061,700
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp 125,807,300	Rp 125,466,400	99.73%	Rp 340,900
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp ,987,116,900	Rp 1,936,396,100	97%	Rp 50,720,800
	TOTAL	Rp 7,980,091,937	Rp 7,840,383,558	98.25%	Rp 139,708,379

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan Capaian Kinerja

Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 2 (dua) sasaran dan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019 - 2023. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar 97% atau kinerja kriteria **Sangat Tinggi**.

B. Langkah Strategis Penguatan Capaian Kinerja Masa Mendatang

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati, berkomitmen tinggi untuk melaksanakan tugas dan amanat yang diemban sesuai dengan Visi-Misi Bupati Padang Lawas Utara, RPJMD dan Renstra. Dengan adanya anjuran efisiensi, Lembaga terus berinovasi dengan tujuan tetap menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Diakui bahwa tahun 2022 ini pelaksanaan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara mengalami beberapa kendala, dan kendala tersebut telah kami evaluasi dan tetapkan langkah perbaikan atau tindaklanjut untuk meningkatkan kinerjanya. Rencana tindaklanjut meliputi :

- a. Meningkatkan kualitas Perencanaan agar dokumen Perencanaan yang disusun dapat digunakan dan dapat mengurangi kesalahan/keraguan dalam pelaksanaan kegiatan sehingga sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
- b. Meningkatkan koordinasi dan melakukan penataan Birokrasi, sehingga terwujud penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih, efektif, efisien dan akuntabel.
- c. Melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja kepada semua bidang secara berkala.
- d. Memperkuat komitmen dari semua bidang untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2022, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan / evaluasi untuk penyusunan kegiatan/kinerja pada masa mendatang. Namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.